

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
			✓										

# Nilai Kerugian Korupsi Jalan Nasional Tunggu BPK

Kandungan aspal telah dikirim aparat kepada saksi ahli yakni Politeknik Negeri Bandung untuk diuji laboratorium.

ASRUL SEPTIAN MALIK

**B**ESARAN kerugian negara akibat korupsi preservasi rekonstruksi Jalan Prof Dr Ir Sutami—Sribhawono—Sp Sribhawono tahun anggaran 2018 dengan nominal Rp147 miliar masih menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

"Kami menunggu untuk hasil audit BPK untuk memastikan spesifik kerugian negara," ujar Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Mestron Siboro, Minggu (28/3).

Selain audit BPK, Polda juga menunggu hasil uji laboratorium kandungan aspal yang dikirimkan aparat kepada saksi ahli yaitu Politeknik Negeri Bandung. Kandungan aspal harus diketahui agar jelas apakah sesuai dengan spesifikasi standar atau tidak. "Kami juga

tunggu hasil uji lab," ujarnya.

Sejauh ini, Polda sudah menetapkan lebih dari tiga orang tersangka yakni dari pihak kontraktor, maupun pihak pelaksana jalan nasional.

Kerugian sementara ditaksir bisa mencapai 40% dari mata anggaran.

Terkait hal itu, Mestron belum bisa memaparkan secara spesifik, sebelum adanya hasil audit dari BPK.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung telah menyegel perusahaan pengaspalan PT Usaha Remaja Mandiri (URM) di Jalan by pass Soekarno-Hatta, Way Laga, Panjang, pada 26 Maret 2021.

Di area perusahaan tersebut, terdapat beberapa titik yang diberi garis polisi. Dua di antaranya ruang petinggi di kantor tersebut, satu ruang administrasi, satu dan *mixing* aspal, dan puluhan drum berisi aspal.

Setidaknya dokumen yang

dimuat dalam tiga koper, satu CPU, dan setumpuk dokumen, serta *sample* aspal dari perusahaan dibawa dari perusahaan tersebut oleh Subdit III Tindak Pidana Korupsi Dirreskrimsus Polda Lampung.

Aparat saat ini juga tengah menunggu audit BPK untuk mengetahui berapa kerugian negara dari dugaan korupsi pengerjaan jalan nasional yang dikerjakan Pelaksana Jalan Nasional

Wilayah I Provinsi Lampung.

## Panggil BPJN

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Lampung, Midi Iswanto mengatakan ruas Jalan Ir Sutami—Sribhawono—Simpang Sribhawono merupakan jalan nasional yang memerlukan perlakuan dan perawatan secara khusus.

Jalan nasional tersebut kewenangannya berada di Balai Pengelolaan Jalan

**“**  
Nanti kami panggil balainya (BPJN) untuk menanyakan seperti apa pelaksanaannya di lapangan.  
**”**

Nasional (BPJN) serta penganggaran ada di Pemerintah Pusat. Namun, DPRD Lampung memiliki kewenangan mengawasi. "Ketika ditemukan hal yang kurang benar, maka harus diluruskan. Nanti akan kami panggil balainya (BPJN) untuk menanyakan seperti apa pelaksanaannya di lapangan," ujar Midi.

Ya melanjutkan pengelolaan dan perawatan jalan nasional berbeda dengan jalan milik provinsi maupun kabupaten/kota. Perbedaannya terletak pada sisi ketebalan hingga lebar badan jalan.

"Misal ada lubang hanya ditumpahkan *sades* itu tidak bisa, tidak boleh. Harus dilakukan pengerukan dulu, dikupas dulu kemudian diberi minor lapis bawah fondasi (LPB)

yang harus kuat dan diberi batu 57 atau 35. Kemudian di bawahnya dipastikan lapisannya kuat, baru diaspal jika memang akan diaspal. Namun jika *rigid* beton, adukan yang bagus dan sesuai dengan standar yang diruangkan dalam kontrak," kata Midi. (K7)